

Matriks Perbandingan

Peraturan Bupati Boalemo tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa

Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2021	Peraturan Bupati Boalemo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOALEMO	BUPATI BOALEMO
Menimbang:	Menimbang:
<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain Kendaraan Dinas Operasional; b. bahwa untuk kelancaran tugas pejabat/aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan tambahan kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo melalui proses sewa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Anggaran 2020; 	<ul style="list-style-type: none"> a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana antara lain Kendaraan Dinas Operasional; b. bahwa untuk kelancaran tugas pejabat/aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan tambahan kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo melalui proses sewa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Anggaran 2020;
Mengingat:	Mengingat:
<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);	Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);	3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);	4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);	5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);	6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);	7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);	8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);	9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);	10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1565);	11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1565);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);	12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)	14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;	15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);	16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam	17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir

Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);	dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;	18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;	19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);	20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 292);	21. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 171);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2020 Nomor 4);	22. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 292);
23. Peraturan Bupati Boalemo Nomor Tahun tentang Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Nomor)	23. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 292);
	24. Peraturan Bupati Boalemo Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 69);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	Menetapkan:
PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2021	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN ANGGARAN 2022

	Pasal I
	1. Ketentuan dalam Peraturan Bupati Boalemo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2021 Nomor 1), diubah sebagai berikut:
BAB I KETENTUAN UMUM	BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1	Pasal 1
<p>Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pengelolaan Barang Milik Daerah. 4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah dan melakukan pembinaan atau pelaksanaan Pengelolaan Barang Daerah. 5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas khusus/lapangan. 6. Kendaraan Dinas Operasional Sewa yang selanjutnya disebut dengan KDO-S adalah kendaraan sewa yang dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, tidak termasuk kendaraan seperti bus, pemadam kebakaran, kendaraan operasional bak terbuka, mobil patrol dan sejenisnya. 	Tetap

<p>7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.</p> <p>8. Pengendali KDO-S adalah Sekretaris Daerah selaku pengendali barang.</p> <p>9. Pengguna Barang adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut DPA-OPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.</p>	
<p>BAB II ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN</p>	<p>BAB II ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN</p>
<p>Pasal 2</p>	<p>Pasal 2</p>
<p>Asas penggunaan KDO-S meliputi:</p> <p>a. hemat, berarti penggunaan kendaraan dinas operasional tepat sasaran dan tepat guna untuk dimanfaatkan pada kegiatan OPD;</p> <p>b. efektif, berarti penggunaan KDO-S sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan hasil sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;</p> <p>c. efisien, berarti penggunaan KDO-S menggunakan dana yang sehemat-hematnya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan;</p> <p>d. keadilan, berarti penggunaan KDO-S tidak mengutamakan hubungan kekerabatan, pertemanan atau kedekatan melainkan harus adil dan berdasarkan pada kebutuhan yang sebenarnya.</p>	<p>Tetap</p>
<p>Pasal 3</p>	<p>Pasal 3</p>
<p>Tujuan KDO-S sebagai sarana pendukung dalam melaksanakan tugas, fungsi dan sasaran yang hendak dicapai sebagaimana ditetapkan dalam kontrak kinerja OPD.</p>	<p>Tetap</p>
<p>BAB III KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN</p>	<p>BAB III KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN</p>
<p>Bagian Kesatu Kebutuhan</p>	<p>Bagian Kesatu Kebutuhan</p>
<p>Pasal 4</p>	<p>Pasal 4</p>

(1) Pada awal tahun anggaran, Pengguna Barang mengajukan usulan kebutuhan sesuai dengan beban tugas yang akan dilaksanakan dalam tahun berjalan kepada pengelola Barang. (2) Usulan kebutuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di evaluasi oleh Pengelola Barang	Tetap
Pasal 5	Pasal 5
(1) Berdasarkan hasil evaluasi kebutuhan dengan memperhatikan keterbatasan Kendaraan Dinas Operasional dan untuk meningkatkan kelancaran tugas fungsinya pada OPD dapat diberikan KDO-S. (2) KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapat persetujuan Kepala Daerah melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.	Tetap
Bagian Kedua Pemanfaatan	Bagian Kedua Pemanfaatan
Pasal 6	Pasal 6
(1) KDO-S dimanfaatkan sepenuhnya untuk menunjang kegiatan OPD; (2) KDO-S pada masing-masing OPD dapat dipinjamkan untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Boalemo; (3) Pemutasian KDO-S tidak diperbolehkan dari satu OPD ke OPD lain selama masa kontrak; (4) Pengelola barang sewaktu-waktu dapat menarik seluruh atau Sebagian KDO-S apabila dibutuhkan.	Tetap
BAB IV TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN	BAB IV TATA CARA DAN SPESIFIKASI PENYEWAAN
Pasal 7	Pasal 7
(1) Pemberian KDO-S sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilaksanakan apabila telah tersedia anggaran dalam DPA OPD Tahun 2021; (2) KDO-S disewa dari pihak ketiga yang berbadan hukum dan pengadaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. (3) KDO-S yang akan disewa didasarkan pada manfaat kegunaannya yaitu yang bersifat <i>Multi Purpose Vehicle</i> (MPV) dengan kapasitas penumpang 7 (tujuh) orang.	Tetap

Pasal 8	Pasal 8
<p>(1) Kendaraan yang disewa adalah kendaraan yang pembelian Tahun 2018-2020 yang dibuktikan dengan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan);</p> <p>(2) Apabila terdapat pembelian kendaraan Tahun 2021, maka standar sewa pembayaran kendaraan disetarakan dengan pembelian Tahun 2020;</p> <p>(3) Kendaraan yang disewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan yang sejak pembelian menggunakan plat nomor DM (BBN I).</p>	Tetap
Pasal 9	Pasal 9
<p>(1) Masa sewa KDO-S untuk jangka waktu paling lama:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Enam bulan pertama 1 Januari 2021 s/d 30 Juni 2021; - Enam bulan kedua 1 Juli 2021 s/d 31 Desember 2021 <p>(2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud ayat (1) dimulai sejak tanggal dokumen kontrak di tandatangani (diatas tanggal penayangan melalui mekanisme <i>E-Purchasing</i>).</p> <p>(3) Nilai sewa KDO mengacu pada standard E-Katalog;</p> <p>(4) Kapasitas mesin dari kendaraan yang disewa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eselon II maksimal 2000 cc; - Eselon III maksimal 1600 cc. <p>(5) Kapasitas mesin dari kendaraan yang disewa untuk Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK disertakan dengan Eselon II;</p> <p>(6) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eselon II Maksimal Rp72.000.000,00/tahun; - Eselon III Maksimal Rp60.000.000,00/tahun. <p>Yang cara pembayarannya dilakukan bertahap sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing 50% dari nilai kontrak pada awal kontrak dan selebihnya dibayarkan pada pertengahan masa kontrak.</p>	<p>(1) Masa sewa KDO-S untuk jangka waktu paling lama:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Enam bulan pertama Bulan Januari s/d Juni tahun berjalan; b. Enam bulan kedua Bulan Juli s/d Desember tahun berjalan. <p>(2) Masa sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak tanggal dokumen kontrak ditandatangani (diatas tanggal penayangan melalui mekanisme <i>E-Purchasing</i>);</p> <p>(3) Nilai sewa KDO-S mengacu pada standar <i>E-Katalog</i>;</p> <p>(4) Kapasitas mesin dari kendaraan yang disewa sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eselon II maksimal 2000 cc - Eselon III maksimal 1600 cc <p>(5) Kapasitas mesin dari kendaraan yang disewa untuk Ketua Tim Penggerak PKK dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK disetarakan dengan Eselon II;</p> <p>(6) Nilai sewa KDO-S sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eselon II maksimal Rp72.000.000,00/tahun - Eselon III maksimal Rp60.000.000,00/tahun <p>Yang cara pembayarannya dilakukan bertahap sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing 50% dari nilai kontrak pada awal kontrak dan selebihnya dibayarkan pada pertengahan masa kontrak.</p>
Pasal 10	Pasal 10
KDO-S yang disewa termasuk fasilitas asuransi <i>all risk</i> (semua resiko), pemeliharaan umum dan perawatan suku cadang ditanggung oleh pihak yang menyewakan.	Tetap

Pasal 11	Pasal 11
Untuk keperluan pemeliharaan umum dan perawatan secara berkala, KDO-S yang disewa diserahkan kepada pihak yang menyewakan.	Tetap
Pasal 12	Pasal 12
(1) Persyaratan tambahan lain dapat dicantumkan dalam perjanjian sewa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11; (2) Bukti-bukti yang dilampirkan dalam perjanjian sewa: a. Foto copy Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB); b. Foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK); c. Foto copy <i>Notice Pajak</i> ; d. Foto copy Asuransi.	Tetap
Pasal 13	Pasal 13
(1) Untuk kebutuhan operasional setiap KDO-S diberikan BBM sesuai dengan standar satuan harga.	Tetap
BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	
Pasal 14	Pasal 14
(1) Pimpinan OPD bertanggungjawab terhadap pengendalian dan pengawasan penggunaan KDO-S; (2) Pengguna KDO-S bertanggungjawab kepada pimpinan OPD atas operasionalisasi KDO-S yang ditunagkan dan ditandatangani dalam surat pernyataan oleh pengguna KDO-S. (3) Untuk pengendalian, pengawasan dan tertib penggunaannya, setiap KDO-S diberikan identitas berupa stiker KDO-S.	Tetap
BAB VI KETENTUAN DAN SANKSI	BAB VI KETENTUAN DAN SANKSI
Pasal 15	Pasal 15
(1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 14 ayat (2) maka akan dikenakan sanksi; (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. teguran lisan oleh pengendali;	Tetap

b. teguran tertulis oleh pengendali; c. penarikan kendaraan sewa oleh pengendali. (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan.	
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16	Pasal 16
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Boalemo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boalemo Tahun Anggaran 2019 di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Tetap
Pasal 17	Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Boalemo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.	Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Boalemo ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.
Ditetapkan di Tilamuta Pada tanggal 4 Januari 2021 WAKIL BUPATI BOALEMO Ttd. ANAS JUSUF	Ditetapkan di Tilamuta Pada tanggal 3 Januari 2022 BUPATI BOALEMO Ttd. ANAS JUSUF
Diundangkan di Tilamuta Pada tanggal 4 Januari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO Ttd. SHERMAN MORIDU, S.Pd, MM BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2021 NOMOR 1	Diundangkan Gorontalo Pada tanggal 3 Januari 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO, Ttd. SHERMAN MORIDU, S.Pd, MM BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 5